

Kiprah AgroForestri

VOLUME 14 NO. 3 – OKTOBER 2025

Kontribusi nyata untuk lahan lestari dan masyarakat sejahtera



Membangun Ekonomi Hijau melalui AgroForestri

Dilema
ekonomi vs
lingkungan
hal. 6

Peran RPPEG
dalam pemulihan
dan pencegahan
hal. 12

Pertumbuhan ekonomi
hijau untuk kebun
dapur berkelanjutan
hal. 15



ISSN: 2089-2500



Daftar Isi

- 3** Meninjau ekonomi hijau
- 6** Dilema ekonomi vs lingkungan: Bisakah LUMENS menyelesaikannya?
- 8** Memulihkan sungai lewat ekonomi hijau: Mencari jalan keluar dari dilema lama
- 10** Langkah kolektif menata wajah baru kakao Luwu Utara: Pembelajaran dari proses perencanaan peta jalan komoditas berbasis yurisdiksi
- 12** Berbenah dari kebakaran lahan: Peran RPPEG dalam pemulihan dan pencegahan
- 14** Mewujudkan kakao yang berkelanjutan melalui perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan
- 15** Menanamkan rasa aman pada iklim yang menantang: Pertumbuhan ekonomi hijau untuk kebun dapur berkelanjutan
- 17** Pojok Anak: Upaya sederhana untuk melibatkan perempuan dalam ekonomi hijau
- 18** Menjemput harapan berkembangnya kopi dari Tanah Timor

Redaksi

Penanggung jawab
Andree Ekadinata

Pimpinan redaksi
Tikah Atikah

Wakil pimpinan redaksi
Arizka Mufida

Kontributor
Ira Ratna Sari, Feri Johana, Aрга Pandiwijaya, Dony Indarto, Anugerah Yuliadi, Erni, Izhar Ashofie, Alfonsus Seran, Fitri Marulani, Sinta Damayanti, Andi Prahmono, Iskak Nungky Ismawan, Thifali Adzani, Ade Oktariansyah, Dikdik Permadi

Editor
Dony Indarto, Erlangga, Dikdik Permadi, Seruni Fauzia Lestari, Ratnasari, Thifali Adzani, Dhian Rachmawati, Pijar Anugerah, Muhammad Fikri Fadhillah, Suraida Meisari, Andre Prasetyo, Faza Iza Mahezs

Desain dan tata letak
Riky Mulya Hilmansyah dan Muhammad Azizy

Foto sampul depan dan belakang
Kate Evans/CIFOR-ICRAF Indonesia

Keterangan foto sampul
Pemandangan udara dari lanskap sekitar Taman Nasional Halimun Salak, Jawa Barat, Indonesia

Dari redaksi

Selamat datang di **Kiprah Agroforestri Vol. 14, No. 3, Oktober 2025** dengan tema **Pertumbuhan Ekonomi Hijau**. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang adil secara ekonomi dan lingkungan, perencanaan berbasis bukti menjadi krusial. Karena itu, edisi ini menghadirkan wawasan, perspektif, dan inspirasi mengenai upaya mewujudkan ekonomi hijau, dari kebijakan lanskap hingga implementasi di tapak.

Edisi dibuka dengan artikel **Seruni F. Lestari** yang menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi hijau, relevansinya, serta gagasan penerapannya di Indonesia. Dilanjutkan dengan artikel **Faza I. Mahezs** tentang LUMENS sebagai perangkat analisis yang memperkuat *Green Growth Plan*, serta **Nur Amin Syafri** mengenai pentingnya perencanaan ekonomi hijau di tingkat lanskap. **Tania Benita** menyoroti proses pembelajaran kolektif melalui peta jalan kakao lestari, sementara **Iman Sumantri** mengulas pengelolaan dan perlindungan gambut di Kubu Raya.

Tulisan lainnya hadir dari **M. Syahrir** tentang agroforestri kakao, **Balgies D. Fortuna** mengenai inisiatif lokal mengatasi kerawanan pangan, **Era Irhamni** tentang pelibatan perempuan dalam praktik pertanian cerdas iklim, dan **Nurhayatun Nafsiyah** mengenai pentingnya peremajaan kopi di NTT.

Semoga edisi ini memperkaya pemahaman pembaca tentang konsep dan praktik pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Selamat membaca!

Selayang pandang CIFOR-ICRAF Indonesia

Pada Juni 2025, CIFOR-ICRAF Indonesia melalui **Proyek SOLUSI** menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Bangka Belitung untuk merumuskan isu strategis pengelolaan bentang darat-laut terpadu sebagai dasar penyusunan masterplan.

Seminar Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan pada 25 Juli 2025 di Medan resmi menandai berakhirnya proyek **SFITAL** di Sumatera Utara. Selama lima tahun (2020 – 2025), SFITAL mendampingi petani, penyuluh, pemerintah daerah, dan mitra di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Didanai IFAD dan dilaksanakan CIFOR-ICRAF bersama Rainforest Alliance, MAFI, dan sektor swasta, proyek ini menghasilkan beragam

capaian di antaranya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), lebih dari 800 petani terlatih, 14 demplot praktik terbaik, kolaborasi pupuk organik, publikasi ilmiah dan e-learning agroforestri sawit.

Selama Juni – Juli 2025, riset-aksi Land4Lives bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Bone, Sulawesi Selatan meluncurkan muatan lokal (mulok) **Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim**.

Proyek **Epistem** untuk pertama kalinya mengadakan “KOPDAR Komunitas Karsa Bentala” di Palembang, 6-7 Agustus 2025, yang menjadi ruang peningkatan kapasitas, jejaring, dan kolaborasi para pegiat restorasi bentang lahan.

Kami mengajak pembaca untuk berbagi saran dan kritik mengenai Kiprah Agroforestri. Silahkan kirimkan ke email **kiprahagroforestri@cifor-icraf.org**. Untuk versi digital, dapat dilihat melalui blog dengan pindai QR di samping.



kiprahagroforestri.id/blog

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jalan CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat, Bogor, 16115, Indonesia

☎ 0251 8625415; ✉ cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org

📷 X CIFOR_ICRAF_ID; 🌐 www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia



Meninjau ekonomi hijau

1



Foto 1. Warga Desa Neke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur sedang memulai musim tanam di tengah krisis iklim



Seruni Fauzia Lestari

Environment and Land-
Based Development
Planning Researcher

 s.lestari@cifor-icraf.org

Seiring dampak kerusakan ekosistem dan perubahan iklim yang diakselerasi oleh aktivitas manusia semakin terasa, ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan yang berusaha menjaga daya dukung lingkungan sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Artikel ini bermaksud menjabarkan apa yang dimaksud dengan ekonomi hijau, mengapa itu penting, dan relevansinya bagi Indonesia. Kami juga menjelaskan tentang konsep ekonomi hijau yang telah dikembangkan oleh CIFOR-ICRAF bersama pemerintah setempat di beberapa daerah di Indonesia. Di akhir artikel, kami menyarankan beberapa aspek penting untuk memastikan penerapan ekonomi hijau dapat berkelanjutan.

Solusi untuk tarik ulur ekonomi dan ekologi

Kelindan krisis iklim, pangan, dan energi telah membuat hampir semua negara banting setir menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Sejak konferensi Rio+20, ekonomi hijau atau pertumbuhan ekonomi hijau (kedua istilah ini seringkali digunakan bergantian) muncul sebagai payung untuk berbagai konsep pembangunan berkelanjutan melalui agenda pembangunan rendah karbon, penghematan penggunaan sumberdaya alam, dan mendorong akses dan penerimaan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Ekonomi hijau menjadi pendekatan paling populer di antara pendekatan-pendekatan yang ditawarkan; salah satunya *degrowth* atau penyusutan ekonomi yang berargumen bahwa penurunan skala produksi dan konsumsi justru diperlukan untuk mengatasi krisis surplus produksi, memulihkan

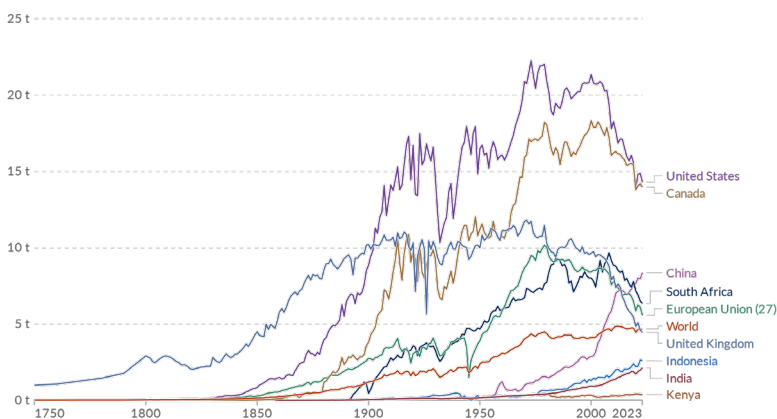
lingkungan yang terdegradasi, dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Pendekatan *degrowth* telah dikritik kurang adil bagi negara dengan jejak karbon per kapita yang masih jauh di bawah rata-rata global karena, berpegang pada asas keadilan, masyarakatnya pun berhak untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam banyak kasus, masyarakat di negara-negara ini adalah yang paling terdampak oleh krisis iklim kendati kuasa atas pembangunan dan kontribusi pada pencemaran lingkungan serta emisi karbon per kapitanya relatif rendah dibandingkan negara-negara maju.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, bagaimana pertumbuhan hijau bisa hadir sebagai solusi yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya dukung lingkungan?

Tarik ulur aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan terjadi karena keterbatasan sumberdaya yang tersedia namun aspek tersebut saling berkelindan bahkan tergantung satu sama lain.

CO₂ emissions per capita

Carbon dioxide (CO₂) emissions from burning fossil fuels and industrial processes¹. This includes emissions from transport, electricity generation, and heating, but not land-use change².



Data source: Global Carbon Budget (2024); Population based on various sources (2024)
OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY

1. Fossil CO₂ emissions This refers to the carbon dioxide released when burning fossil fuels or from certain industrial activities. Burning fossil fuels – coal, oil, and gas – produces CO₂ during transport (cars, trucks, planes), electricity generation, heating, and energy use in industry. This also includes flaring, which is the burning of extra gas during oil and gas extraction. Some industrial processes also release CO₂. This happens especially in cement and steel production, where chemical reactions (unrelated to burning fuel) produce carbon dioxide. These figures don't include CO₂ emissions from changes in land use, like deforestation or reforestation.

2. Land-use change emissions Land-use change emissions are the carbon dioxide (CO₂) released or removed when land use changes. They mostly come from deforestation, forest degradation, turning forests or other ecosystems into cropland or pasture, and draining peatlands. When vegetation is cleared or burned, the carbon stored in plants and soil is released as CO₂. Land-use change can also remove CO₂ from the atmosphere when vegetation grows back, for example, when forests regrow. This can lead to negative emissions in the data.

In scientific and policy discussions, these emissions are sometimes grouped under the broader term "LULUCF" (land use, land-use change, and forestry).

These estimates are uncertain because they depend on limited data and assumptions about land cover, how much carbon is stored in ecosystems, and how land is managed.

They are separate from fossil CO₂ emissions from burning fossil fuels and certain industrial processes.

Gambar 1. Emisi CO₂ per kapita (Sumber: Our World in Data, 2025)

Ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth*) berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai kesepakatan para pihak dengan tetap mempertimbangkan dampak ekologi dan sosial.

Sebagai contoh, pada proyeksi skenario Business as Usual (BAU) dalam *Green Growth Plan* Sumatera Selatan 2017-2030, ekspansi komoditas unggulan daerah justru memperlemah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika strategi ekspansi dibandingkan dengan peningkatan produktivitas per unit area (praktik pertanian baik, melalui intensifikasi maupun agroforestri) maka PDRB dapat meningkat 3% dari BAU. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada skenario BAU juga menghasilkan emisi 22% lebih tinggi dibandingkan skenario ekonomi hijau.

Pertumbuhan berbasis ekonomi hijau berupaya menerapkan kegiatan ekonomi berbasis lahan yang selaras dengan kondisi lingkungan setempat – misalnya pemilihan komoditas – sekaligus mengurangi dampak negatif pada lingkungan melalui praktik pertanian yang baik. Ilustrasi dari Sumatera Selatan menunjukkan potensi daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau.

GGP Sumsel juga menunjukkan bahwa sektor lahan berpotensi untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di tingkat provinsi maupun daerah. Hal ini bisa dicapai dengan memaksimalkan sinergi antara kegiatan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan, sehingga dampak negatif pada lingkungan tetap terkendali.

Indonesia di persimpangan jalan: dilema dan peluang

Indonesia sedang berada pada fase yang krusial. Di satu sisi, berambisi untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain, tengah berupaya meningkatkan kualitas lingkungan dan penghidupan dengan tetap menjaga beragam ekosistem tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Pemerintah Indonesia semakin menyatakan keseriusan mewujudkan pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim, dan inklusif. Melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Pemerintah mendorong adopsi pertumbuhan ekonomi hijau di pusat dan daerah dengan ditetapkannya indeks ekonomi hijau (*Green Economy Index/GEI*) sebagai salah satu indikator pembangunan. GEI mengukur kinerja negara/provinsi untuk mencapai target keberlanjutan melalui 16 indikator dari tiga pilar; lingkungan, sosial dan ekonomi. Meski target GEI untuk setiap provinsi telah ditetapkan hingga 2045, namun Pemerintah belum menyertakan strategi yang dapat digunakan daerah agar dapat mencapai target tersebut.

Konsep pertumbuhan ekonomi hijau yang didorong oleh CIFOR-ICRAF Indonesia melalui GGP menawarkan pendekatan yang mendukung pencapaian GEI, khususnya untuk daerah yang bergantung pada sektor ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan di sektor lahan. Jika strategi intervensi dalam GGP dilaksanakan dengan baik, maka dapat berkontribusi untuk memperbaiki beberapa

indikator GEI. Contohnya, upaya meningkatkan luasan hutan dapat didukung oleh rehabilitasi dengan agroforestri yang dirumuskan dalam GGP.

Agroforestri, yakni praktik menanam pohon di kebun, dapat menjaga kualitas lingkungan (tanah, iklim mikro, keanekaragaman hayati) sekaligus menambah penghasilan petani melalui beragam komoditas dalam satu hamparan. Tanpa disadari, praktik agroforestri di tingkat tapak di Sumsel, Sulsel dan NTT yang telah berjalan ratusan tahun telah banyak berkontribusi terhadap perwujudan ekonomi hijau di tingkat makro. Pertumbuhan ekonomi hijau dengan agroforestri memberikan peluang menurunkan emisi GRK, meningkatkan biodiversitas, menghadirkan peluang penghidupan yang berketahanan iklim, dan meningkatkan ketahanan pangan. Optimalisasi penerapan agroforestri menjadi salah satu landasan kunci dalam strategi GGP yang disusun CIFOR-ICRAF bersama pemerintah di beberapa daerah di Indonesia seperti Sumsel, Jambi, Aceh, Papua, Papua Barat, Sulsel dan NTT.

Fokus lainnya dari GGP ialah pengelolaan sumberdaya, khususnya dari sektor berbasis lahan, sebagai solusi berbasis alam (*nature-based solutions*) untuk permasalahan iklim.

Mengingat sektor lahan adalah ruang yang terbatas, GGP mengutamakan perumusan strategi dengan skenario berbasis spasial dan proses diskusi yang melibatkan dan disepakati para pihak. GGP juga dilengkapi dengan peta jalan yang merinci tata waktu pelaksanaan, pemangku kepentingan, dan potensi pendanaan. Strategi dan peta jalan ini kemudian diarusutamakan ke dalam berbagai tingkat pembangunan dan perencanaan tata ruang.

Mendorong transformasi ekonomi melalui GGP

Penerapan ekonomi hijau di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dapat terwujud tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan bagi negara-negara yang paling terdampak oleh krisis iklim dan berupaya mengurangi kerusakan ekologi dari model pertumbuhan konvensional sambil tetap memenuhi hak masyarakatnya akan peningkatan taraf hidup.

Pertanyaan besarnya adalah bagaimana penerapan ekonomi hijau bisa berkelanjutan bagi daerah? Pembelajaran dari GGP terdahulu menunjukkan beberapa prinsip kunci yang perlu diperhatikan.

Pertama, monitoring dan evaluasi dampak.

Perlu dipersiapkan kelembagaan dan perangkat untuk monitoring dan evaluasi dampak yang komprehensif untuk meninjau sejauh apa tujuan GGP di setiap daerah berhasil dicapai.

Kedua, peningkatan kapasitas dan data.

Data, khususnya data spasial, menjadi elemen penting dalam analisis GGP. Peningkatan kapasitas Pokja perlu dilakukan agar dapat mengawal analisis data GGP dengan baik.

Ketiga, komitmen pengelolaan data secara multipihak.

Monev melalui sistem informasi GGP memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data, mengolah dan menginput ke dalam sistem, serta perawatan portal dan server sehingga dapat diakses dan dikawal oleh seluruh pihak.

Keempat, pengarusutamaan dalam kebijakan

Pengarusutamaan GGP perlu dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk menerapkan kebijakan GGP yang sudah ada di tingkat provinsi.

Ira Ratna Sari, Feri Johana, dan Arga Pandiwijaya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.



Dilema ekonomi vs lingkungan

Bisakah LUMENS menyelesaikannya?



Foto 1. Hamparan luas lahan “tidur” di Saleh Sugihan, Sumatera Selatan

© Anugerah Yulianti/CIFOR-ICRAF Program Indonesia



Faza Iza Mahezs
NRM Tool Development
Assistant

f.mahezs@cifor-icraf.org

Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, banyak lahan terbentang luas namun tak tergarap. Di balik hamparan hijau itu, tersimpan potensi pangan sebagai sumber ekonomi atau justru sebaliknya bencana ekologis jika kita keliru dalam pengelolaannya.

“Optimalisasi lahan tidur dan rawa menjadi lahan produktif juga perlu dilakukan... sehingga lahan pertanian bisa diperluas,” begitu harapan Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, Holda, mengenai arah pembangunan Sumsel, sebagaimana dikutip oleh rmolsumsel.id.

Pernyataan ini senada dengan ambisi pemerintah pusat untuk menjadikan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Sebagaimana dinyatakan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, bahwa dari total 409.977 hektare lahan rawa, 150.000 hektare akan digunakan untuk program cetak sawah baru pada 2025 (rmolsumsel.id).

Namun di balik ambisi tersebut, tersimpan tantangan krusial: di mana lokasi paling tepat untuk mengimplementasikan program ini agar tidak merusak ekosistem yang ada? Tidak semua lahan tidur benar-benar “kosong” dari fungsi ekologis. Banyak di antaranya penting dalam siklus hidrologi, penyimpan karbon, dan habitat keanekaragaman hayati lokal.

Situasi semacam ini tak hanya terjadi di Sumatera Selatan. Ini adalah gambaran umum yang juga dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia yang menggantungkan pendapatan utamanya pada sektor berbasis lahan.

Selain itu, paradigma dalam proses perencanaan berbasis lahan kerap kali menempatkan pemerintah daerah sebagai entitas tunggal dalam mencari solusi dan merumuskan regulasi. Pendekatan ini mengakibatkan keputusan sering terasa dipaksakan dan kurang mengakomodasi para pemangku kepentingan di lapangan. Pelibatan berbagai pihak diperlukan untuk menghimpun aspirasi dan memahami keterkaitan sebab-akibat dalam merumuskan regulasi yang implementasinya akan berdampak pada lanskap masa depan.

LUMENS sebagai alat bantu

Salah satu strategi pembangunan berbasis ekonomi hijau adalah pengelolaan tata ruang dan guna lahan terintegrasi. Hal ini mencakup upaya pengelolaan ruang yang seimbang untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebelumnya, proses negosiasi tata kelola lahan kurang terfasilitasi dengan baik karena tidak adanya alat bantu (*platform*) yang dapat menunjukkan potensi area intervensi, lokasi intervensi yang tepat sesuai fungsi kawasan, dan skala intervensi yang dapat diimplementasikan (van Noordwijk M, Tomich TP, dan Verbist B. 2001).

Untuk menjawab tantangan ini, ICRAF Indonesia memperkenalkan LUMENS (*Land Use Planning for Multiple Environmental Services*), sebuah kerangka berpikir dengan berbagai perangkat analisis untuk mendukung pemerintah daerah menyusun kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan (Dewi S., dkk, 2023).

Sejak diperkenalkan pada tahun 2013, LUMENS terus berkembang dan kini dilengkapi empat modul utama analisis ([lihat lumens.or.id](http://lumens.or.id)).



Gambar 1. Modul-modul utama LUMENS

Sebagai alat bantu, LUMENS memungkinkan simulasi kebijakan secara komprehensif, khususnya berkaitan dengan kebijakan pembangunan pada sektor berbasis lahan. Misalnya, jika 10.000 hektare lahan gambut dibuka untuk perkebunan, maka sejauh mana dampak ekonominya dan seberapa besar risiko lingkungannya? Dari simulasi ini, potensi *trade-offs* antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan bisa dipetakan dengan jelas. Tak hanya itu, LUMENS juga mendorong negosiasi multipihak, sehingga aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari dinas teknis hingga masyarakat, dapat terakomodasi dalam perencanaan bentang lahan.

Dalam satu dekade terakhir, LUMENS membantu Sumatera Selatan menyusun perencanaan wilayah yang lebih terarah. Sebelumnya, proses penyusunan dokumen perencanaan hanya berdasarkan identifikasi tren dari data statistik linear, sehingga pemerintah daerah bingung menentukan intervensi dan kebijakan apa yang paling tepat untuk menjawab isu-isu spesifik di wilayahnya.

Hasilnya? Perencanaan pembangunan yang lebih lestari tak lagi sekadar jargon. LUMENS

membantu menyusun regulasi yang konkret dan terukur, salah satunya melalui dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Sumsel, yang disusun dengan pendekatan berbasis bukti dan negosiasi yang inklusif dalam kerangka kerja LUMENS.

Peran LUMENS dalam memproyeksikan implementasi RPPEG untuk perlindungan dan pengelolaan 1.7 juta hektare gambut menunjukkan skenario ini terbukti lebih unggul daripada Business as Usual (BAU). Simulasi memperkirakan penurunan emisi GRK pada lahan gambut sebesar 1,1% dan 32% pada lahan mineral pada periode 2025-2050. Sementara itu, ekonomi daerah (PDRB) dalam skenario RPPEG tumbuh 7,42%, lebih tinggi dibandingkan BAU pada tahun 2050. Namun, data dan proyeksi

yang menjanjikan ini barulah langkah awal di atas kertas. Keberhasilannya masih harus diuji melalui implementasi nyata di lapangan.

Tantangan ke depan

Tantangan sebenarnya muncul saat rencana yang disusun harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata di lapangan. Pertanyaan penting yang harus direnungkan adalah bagaimana memastikan rencana-rencana yang telah disusun dengan baik dapat dilaksanakan secara konsisten. Hal ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan program, terlepas dari dinamika politik lokal yang ada.

LUMENS telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung proses perencanaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Keberhasilannya akan ditentukan pada bagaimana menjembatani visi dan aksi, menjadikan dokumen perencanaan sebagai pijakan, membangun sinergi lintas sektor, serta menjaga keberlanjutan program. Dengan demikian, pembangunan daerah yang berkeadilan ekonomi dan lingkungan dapat menjadi kenyataan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekosistem.



Foto 2. Pelatihan perangkat lunak LUMENS kepada OPD Sumatera Selatan

Dony Indiarto dan Anugerah Yuliadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Memulihkan sungai lewat ekonomi hijau

Mencari jalan keluar dari dilema lama



Nur Amin Syafri

South Sulawesi
Land Use Planning
Officer

n.syafri@cifor-icraf.org

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah bentang lahan yang punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi hijau. Selain sebagai penunjang kehidupan sehari-hari dengan menyediakan berbagai jasa lingkungan seperti air bersih, keanekaragaman hayati, lahan yang subur, dan sumber pangan, DAS juga mendukung aktivitas ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun, banyak DAS di Indonesia dalam keadaan kritis – ada 108, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, dengan luas total sekitar 14 juta hektare.

Salah satu DAS yang sedang dalam keadaan kritis adalah Bila Walanae, DAS terbesar di Sulawesi Selatan dengan luas 744.896 Ha – mencakup delapan kabupaten dan dihuni oleh kurang lebih 2,4 juta jiwa. Menurut dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Bila Walanae tahun 2025 – 2040 yang diterbitkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada 2025, DAS ini



Foto 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila Walanae, Kab. Bone

mengalami penurunan kapasitas penyangga, ditandai dengan peningkatan luas lahan kritis (22% dari luas DAS) dan frekuensi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, erosi di DAS Bila Walanae disebut sudah melebihi batas toleransi. Sedimentasi di danau Tempe mencapai 15–20 cm per tahun, dan banjir-kekeringan datang silih berganti. Di musim kemarau, petani kesulitan air; di musim hujan, lahan terendam dan hasil panen merugi. Secara ekonomi, situasi ini memberi tekanan pada pendapatan rumah tangga di tingkat tapak dan pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi.

Green Growth Plan Sulawesi Selatan

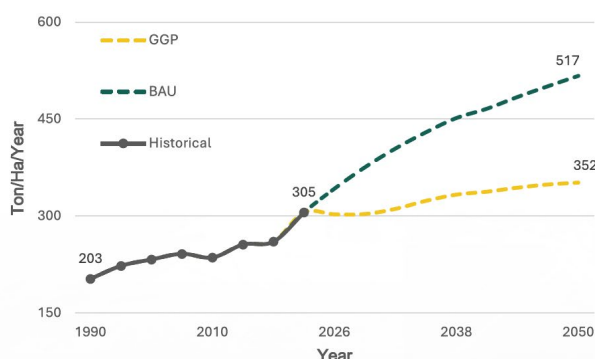
Syukurlah Sulawesi Selatan kini sedang menapaki jalur baru pembangunan melalui Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan/GGP*), sebuah visi yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jembatan penting untuk mewujudkan GGP ialah perlindungan dan pengelolaan DAS — ruang hidup yang menghubungkan hulu dan hilir, desa dan kota, bahkan lokal dan regional.

DAS memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan karena menjadi penghubung langsung antara keberlanjutan ekosistem dan produktivitas sektor berbasis lahan, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. DAS ini tidak hanya merupakan bentang alam, tapi juga “urat nadi” pangan dan penghidupan di Sulawesi Selatan. Di sinilah GGP menemukan relevansinya: membangun ekonomi tanpa mengorbankan alam, tapi justru memulihkannya.

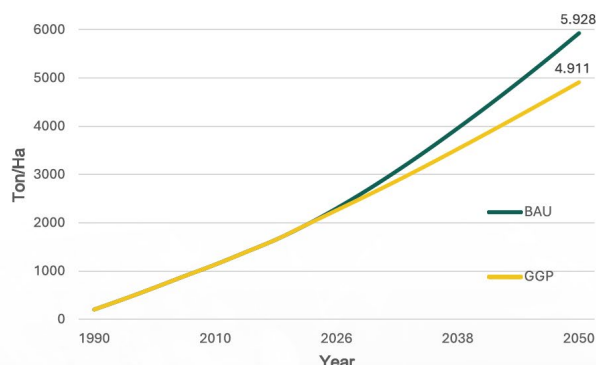


Foto 2. Aktivitas di sekitar DAS Bila Walanae

Rata-rata laju potensi erosi per tahun



Erosi kumulatif



Gambar 2. (a) Grafik perbandingan erosi BAU vs GGP

Pemulihan DAS Bila Walanae merupakan langkah yang tepat untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau bukan sekadar jargon, melainkan jalan keluar dari dilema lama: memilih antara ekonomi atau lingkungan.

GGP Sulawesi Selatan, khususnya Strategi 6: Pengelolaan dan Restorasi DAS, menjabarkan upaya pemulihan DAS melalui agroforestri, konservasi air, dan perlindungan kualitas lingkungan. Pemodelan menunjukkan bahwa skenario GGP mampu menurunkan akumulasi erosi hingga 17% dibandingkan Business as Usual, sambil menjaga produktivitas lahan. Lebih jauh lagi, perbaikan rantai nilai (GGP-3) diproyeksikan menaikkan PDRB 4,6% dan serapan tenaga kerja hampir 30% pada 2050. Artinya, memulihkan DAS bukan sekadar urusan lingkungan, melainkan investasi ekonomi yang nyata.

Keluar dari dilema lama

Pemulihan DAS Bila Walanae merupakan langkah yang tepat untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau

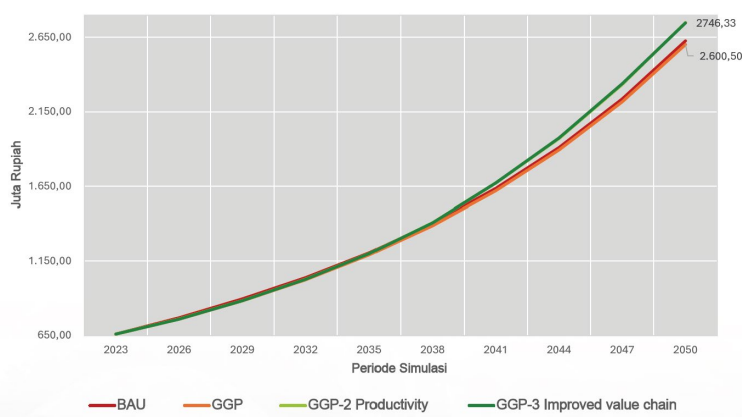
bukan jargon, melainkan jalan keluar dari dilema lama: memilih antara ekonomi atau lingkungan. Untuk itu, semua pihak punya andil dalam memastikan upaya ini berhasil.

Di tingkat tapak, petani, nelayan, dan masyarakat lokal harus menjadi garda terdepan melalui penerapan praktik ramah lingkungan yang memberi nilai tambah pada hasil mereka. Di tingkat bentang lahan pemerintah daerah perlu mendorong agroforestri melalui insentif bagi petani, seperti bibit gratis atau akses pasar untuk produk ramah lingkungan. Di level provinsi, kebijakan dan investasi dapat diarahkan untuk memperkuat konektivitas, memperbaiki rantai nilai, dan memastikan setiap hektar lahan bekerja optimal tanpa merusak ekosistem.

Melalui kerangka dan skenario GGP, kita semua — pemerintah, swasta, komunitas, hingga pembaca majalah ini — dapat berperan dalam mewujudkan peningkatan penghidupan yang selaras dengan pemulihan ekosistem. Kita bisa mulai dengan hal sederhana: menanam pohon di bantaran sungai, mendukung produk berkelanjutan, atau menyuarakan pentingnya kebijakan berbasis ekologi. Sebab, ketika DAS pulih, ekonomi pun mengalir.

Erni berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang **GGP Sulawesi Selatan**, kunjungi laman di bawah agroforestri.id/ggpsulsel



Gambar 2. (b) Grafik proyeksi PDRB

Langkah kolektif menata wajah baru kakao Luwu Utara

Pembelajaran dari proses perencanaan peta jalan komoditas berbasis yurisdiksi



Tania Benita

Sustainable Landscape Management and Policy Researcher

t.benita@cifor-icraf.org

Di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, kakao bukan sekadar komoditas tetapi menjadi bagian dari identitas sosial dan ekonomi masyarakat. "Siapa di sini yang bersekolah karena kakao?" tanya Bupati Indah Indriani dalam forum, sebuah pengingat bahwa kakao telah lama menjadi sumber penghidupan. Meski sempat mencapai masa keemasan pada 2011, produktivitas kakao di daerah ini terus menurun. Namun kontribusi kakao terhadap perekonomian daerah tetap signifikan. Hampir setengah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Luwu Utara berasal dari sektor pertanian, dan separuhnya dari subsektor perkebunan, terutama kakao.

Pada Januari 2021, di tengah pandemi, sejumlah mitra berkumpul di Luwu Utara. Ada pemerintah daerah, kelompok tani, koperasi kakao, difasilitasi oleh Proyek Sustainable Farming in Tropical Landscape (SFITAL) Indonesia, kolaborasi antara ICRAF, Rainforest Alliance dan Mars dengan dukungan pendanaan dari IFAD. Meski memakai masker dan menjaga jarak, semua hadir dengan satu tujuan: menggali kembali potensi dan masa depan kakao.

Pertemuan hari itu bukan mengenai menanam atau memperbaiki hasil panen. Semua menyadari bahwa membangun masa depan kakao berarti juga

berbicara tentang lanskap sosial-ekologis yang kompleks, di mana kepemilikan lahan, dinamika pasar, pengetahuan lokal, dan tata kelola saling terkait. Pendekatan yurisdiksi memungkinkan kolaborasi lintas sektor dalam satu wilayah administratif. Artinya, strategi pengembangan kakao tidak hanya menyoal kebun atau petani, tapi juga menyasar kebijakan daerah dan hubungan antar-aktor.

Untuk memastikan kolaborasi berjalan sesuai tujuan, dibutuhkan mekanisme pengukuran capaian yang adil dan transparan. Di sinilah pentingnya sistem indikator bersama. Seperti ditegaskan oleh Brandão et al. (2020) dalam studinya, sistem indikator yang disepakati bersama menjadi elemen kunci dalam pendekatan yurisdiksi, karena memungkinkan pemantauan dan penguatan capaian secara kolektif. Di Luwu Utara, prinsip, kriteria, dan indikator disusun berdasarkan standar internasional seperti *LandScale*, *Terpercaya*, *SourceUp*, dan Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD). Namun, agar lebih relevan dan aplikatif di tingkat lokal, indikator-indikator tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Penyesuaian ini juga penting untuk mempermudah proses sertifikasi di masa mendatang.¹

¹ Peta jalan kakao Luwu Utara menunjukkan kesesuaian tinggi dengan standar-standar tersebut sebanyak: (i) *LandScale*: 79%, terutama pada aspek lingkungan, tata kelola, dan produksi; (ii) *Terpercaya*: 55%; (iii) *KDSD*: 50%, terutama pada aspek ketahanan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan insentif; dan (iv) *SourceUp*: 49%.

Lahan

- Penurunan luas lahan kakao
- Penurunan daya dukung dan kesuburan lahan
- Kebutuhan peremajaan kebun

Sumber daya manusia dan produktivitas

- Input terbatas (benih unggul dan pupuk)
- Kebutuhan peralatan modern (termasuk fermentasi)
- Keterbatasan penyuluh dengan kompetensi kakao
- Produktivitas dan daya saing rendah
- Rentan terhadap hama dan penyakit

Pasar dan rantai nilai

- Biaya transportasi tinggi
- Kelembagaan rantai nilai rendah
- Tidak ada jaminan dan pelacakan pasar
- Kurangnya transparansi rantai pasok

Tujuh langkah menyusun peta jalan kakao berkelanjutan

Untuk mewujudkan tata kelola kakao yang berkelanjutan, dibutuhkan langkah-langkah sistematis dan partisipatif. Upaya ini dituangkan dalam sebuah peta jalan yang disusun melalui tujuh tahapan utama berikut:

7 langkah menyusun peta jalan kakao lestari

1 Merancang pendekatan lanskap partisipatif

- Petani menyuarakan keluhan soal bibit unggul, pemerintah mengakui keterbatasan anggaran, akademisi merefleksikan kesenjangan riset dan praktik.
- Dialog multipihak menjadi fondasi penggalian isu dan pengetahuan lokal.

2 Menyusun prinsip, kriteria, dan indikator keberlanjutan

- PCI keberlanjutan dikembangkan untuk kemudian ditelaah secara lokal dan ditinjau pakar sebelum disepakati bersama

3 Pra-perencanaan dan memetakan pemangku kepentingan

- Analisis awal terhadap isu strategis daerah serta pemetaan pemangku kepentingan.
- Bappeda menjadi aktor kunci yang mengoordinasikan proses.

4 Melibatkan pemangku kepentingan kunci

- Kelompok Kerja Kakao Lestari dilegalkan melalui SK Bupati No. 188.4.45//21/IV/2021

5 Menetapkan tujuan dan ruang lingkup yang jelas

- Melalui diskusi lintas sektor, visi “Kakao Lestari, Rakyat Sejahtera” disepakati.

6 Mengumpulkan dan menganalisis data

- Data dikumpulkan dari kebijakan, statistik ekonomi, hingga peta spasial.
- Analisis fokus pada dinamika penggunaan lahan (e.g. deforestasi dan ekspansi pertanian), serta penyusunan scenario.

7 Menyusun strategi dan desain peta jalan

- Strategi disusun berdasarkan isu strategis, data empiris, dan hasil pemodelan.
- Peta jalan memuat:
 - Prioritas intervensi,
 - Visualisasi rencana dan peta zonasi,
 - Penetapan timeline dan capaian,
 - Pembagian peran dan tanggung jawab,
 - Fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan, yang diwujudkan dalam sistem monitoring dan evaluasi.

Selama ini arah pembangunan Indonesia banyak ditentukan dari atas ke bawah (*top-down*). Namun, pengalaman Luwu Utara menunjukkan potensi pendekatan perencanaan yang berbeda, yaitu yurisdiksi yang tumbuh dari bawah ke atas, dari kebutuhan masyarakat dan realitas lokal. Alih-alih menerapkan standar keberlanjutan yang seragam dan ditetapkan dari luar, Luwu Utara dapat merumuskan prinsip keberlanjutannya dengan nilai yang digali langsung berdasarkan pengalaman hidup petani, dinamika sosial, dan karakteristik unik lanskapnya.



Foto 1. Penggalian isu pengelolaan kakao di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Luwu Utara

Keberadaan Kelompok Kerja Kakao, yang awalnya bekerja sendiri-sendiri, kini mulai bersatu dalam sebuah *platform* kolaboratif yang solid. Lahirnya Peta Jalan Kakao Lestari tidak hanya relevan bagi Luwu Utara sebagai daerah penghasil kakao, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi wilayah dengan komoditas unggulan lainnya yang ingin menyelaraskan tujuan ekologis, ekonomi, dan sosial. Tiga hal yang menjadi kunci keberhasilan: kepemimpinan aktif para tokoh lokal, kolaborasi lintas sektor, serta kepemilikan di daerah yang diperkuat oleh insentif dan pendampingan.

Pada akhirnya, peta jalan kakao lestari telah menjadi proses pembelajaran kolektif. Proses ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya soal lingkungan atau peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang membangun dialog yang setara di antara para pihak.



Gambar 1. Lima hub perubahan dalam kelompok kerja kakao lestari di Kabupaten Luwu Utara

Berbenah dari kebakaran lahan

Peran RPPEG dalam pemulihan dan pencegahan



Iman Sumantri

Stakeholder Engagement
and Research Associate

i.sumantri@CIFOR-ICRAF.org

Tahukah Anda bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan ekosistem gambut terluas di Indonesia? Di antara seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya menempati posisi istimewa. Sebanyak 66% dari wilayah Kabupaten Kubu Raya tertutup oleh gambut, dan yang lebih mencolok, 48% di antaranya adalah gambut dalam. Data mengatakan Kubu Raya menjadi salah satu daerah dengan tutupan gambut terbesar di Kalimantan Barat. Dari pesisir hingga pedalaman, gambut tidak hanya membentuk lanskap, tetapi juga menjadi elemen vital dalam kehidupan dan identitas masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Bagi masyarakat Kubu Raya, gambut adalah sumber kehidupan sehari-hari. Para petani telah lama memanfaatkan lahan gambut untuk bercocok tanam, mulai dari padi hingga berbagai jenis sayuran dan tanaman buah. Tidak sedikit keluarga yang menggantungkan penghasilan dari hasil hutan gambut seperti rotan, madu hutan, atau tanaman obat yang dipanen tanpa merusak ekosistem. Lebih dari sekadar sumber penghidupan, ekosistem gambut juga menyediakan jasa lingkungan yang tak tergantikan. Sebagai penyimpan cadangan air hujan, gambut turut mengatur pasokan air di musim kering, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies langka, bahkan gambut juga berperan dalam penyerapan karbon, yang penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim¹. Menjaga lahan gambut berarti menjaga keseimbangan

¹ <https://www.kompas.id/artikel/lindungi-gambut-di-kawasan-lindung-sumsel-revisi-rtw>

antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat Kubu Raya.

Kini, Kubu Raya menghadapi tantangan besar yang semakin nyata. Gambut yang seharusnya berperan sebagai pelindung dari krisis iklim, justru terancam akibat alih fungsi lahan, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan tata kelola air. Tahun 2025 menjadi pengingat pahit, kebakaran hutan kembali meluas di sejumlah titik, kepulan asap tebal memenuhi udara, disusul oleh banjir besar yang merendam pemukiman warga dan lahan pertanian. Padahal, Kubu Raya pernah mengalami kebakaran hebat di tahun 2015 dan 2019, yang meninggalkan jejak kerusakan parah di berbagai desa dan sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat. Asap pekat menyelimuti wilayah selama berminggu-minggu, memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian lokal. Sayangnya, kejadian serupa kembali terjadi, menunjukkan bahwa krisis tersebut belum sepenuhnya teratasi.

Bagaimana cara mengatasi kondisi ini?

Dalam suatu kesempatan, Bupati Kubu Raya periode 2019–2024, Muda Mahendrawan, menegaskan: “Gambut bukan sekadar lahan, tapi warisan kehidupan yang harus dijaga demi masa depan generasi Kubu Raya.” Pernyataan ini menjadi pengingat kuat bahwa melindungi gambut bukan hanya sebuah mandat, melainkan fondasi pembangunan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.

Pendekatan pembangunan ekonomi hijau menghadirkan solusi nyata atas dilema kelindan perlindungan ekologi dan

1a



1b

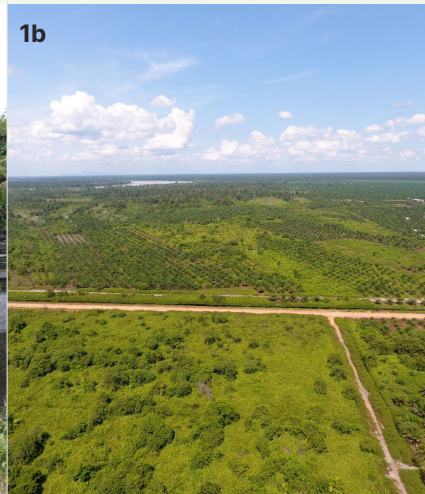


Foto 1. (a) Lahan pembibitan, (b) Pemandangan udara lahan gambut di Provinsi Kalimantan Barat



Foto 2. Diskusi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya mengenai Rencana Penyusunan RPPEG

pertumbuhan ekonomi. Melalui perwujudan beberapa strategi ekonomi hijau, yakni pengelolaan tata ruang yang berimbang dan restorasi ekosistem, perlindungan dan pengelolaan gambut dapat menjadi upaya untuk pelestarian ekosistem sekaligus penggerak kehidupan masyarakat.

Langkah konkret Pemerintah Daerah Kubu Raya untuk melestarikan ekosistem gambut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Sejak 2022, penyusunan RPPEG dilakukan secara partisipatif melalui pembentukan tim khusus oleh pemerintah daerah. Tim ini melibatkan dinas teknis, akademisi, swasta, serta mitra pembangunan seperti ICRAF Indonesia, dengan pendekatan berbasis bukti. Sebagai hasilnya, Kubu Raya menunjukkan komitmen untuk melaksanakan serangkaian langkah penting, mulai dari perlindungan dan pencadangan ekosistem, pemeliharaan serta pemanfaatan yang bijaksana, pengendalian yang efektif, hingga upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Bagi Pemerintah Kubu Raya, penyusunan RPPEG bukan hanya memenuhi amanat regulasi, tapi jadi momen penting untuk menyatukan arah pembangunan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tak ingin RPPEG

hanya sebagai tumpukan kertas, pemerintah daerah mendorong agar substansi dari dokumen ini benar-benar diterapkan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan investasi akan mempertimbangkan keberadaan serta kerentanan lahan gambut.

Melalui dokumen yang berlaku selama 30 tahun ini, pemerintah dapat lebih memahami keberadaan dan kondisi wilayah gambut, serta menentukan langkah-langkah apa yang perlu dijaga. Penjagaan ini dilakukan seiring dengan penerapan kebijakan, program, dan perizinan yang lebih terarah, saling mendukung, dan tetap mengutamakan kelestarian. RPPEG membantu setiap sektor agar berjalan bergandengan tangan dan saling terhubung secara terkoordinasi dalam satu peta besar pembangunan yang berwawasan lingkungan.

RPPEG sebagai alat bantu pemerintah merupakan langkah cerdas untuk membangun daerah tanpa harus mengorbankan ekosistem penting yang menopang kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, RPPEG menyatukan semua pihak dalam satu arah demi lingkungan lestari. Namun, perubahan yang sejati tidak hanya datang dari pemerintah, dukungan masyarakat juga sangat penting dalam menyebarkan

informasi, menjaga lingkungan sekitar, hingga terlibat dalam proses kebijakan.

Warisan untuk esok

Kesadaran masyarakat Kubu Raya untuk menjaga gambut semakin tumbuh, dan tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Di sejumlah desa, praktik baik mulai bermunculan, dengan petani yang menerapkan pertanian ramah lingkungan tanpa membakar. Pertanian yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, menikmati hasil yang lebih stabil, mengurangi kerugian akibat kebakaran lahan, serta memperbaiki ketahanan pangan.

Kehadiran RPPEG akan terus menjadi pijakan penting bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan. Kini saatnya langkah-langkah kolektif diperluas ke seluruh wilayah, agar pengelolaan gambut yang seimbang secara ekologis dan menguntungkan secara ekonomis benar-benar terwujud di seluruh Kubu Raya. Dukungan lintas sektor dan keterlibatan aktif semua pihak adalah kunci keberhasilan jangka panjang.

“Gambut terjaga, bumi bernapas, Kubu Raya Lestari.”

Arga Pandiwijaya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Mewujudkan kakao yang berkelanjutan

melalui perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan



Muhammad Syahrir

South Sulawesi
Provincial Coordinator

m.syahrir@cifor-icraf.org

Sulawesi Selatan adalah salah satu tulang punggung kakao Indonesia, tapi keadaannya sedang tidak baik-baik saja: produktivitasnya kian menurun, tanamannya sudah tua, daya dukung lahan semakin berkurang, dan praktik budidayanya tidak berkelanjutan. Petani kini banyak beralih mengganti tanaman kakaonya ke komoditas lain yang lebih menjanjikan. Bukan tanpa risiko, sebagian besar petani beralih ke sistem monokultur tanaman semusim yang lebih rentan di tengah situasi perubahan iklim.

Salah satunya dirasakan oleh Abidin, petani kakao di Desa Turuadade, Kabupaten Bone. Ia memiliki lahan kakao varietas lokal seluas 0,4 ha yang saat ini telah berumur 30 tahun. Kini produksinya semakin menurun serta rentan terserang hama dan penyakit. Minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki membuatnya putus asa dan berpikir untuk mengganti kakaonya dengan tanaman lain, walau ia urungkan.

Begitu juga dengan Leang, petani kakao di Desa Magenrang, masih di Kabupaten Bone. Di tengah tekanan mayoritas petani sekitar yang telah beralih menanam padi

dan jagung, ia masih bertahan dengan kebun kakaonya seluas 1 ha. Namun, nilai tambah yang ia dapatkan dari biji kakao dirasa belum maksimal. Meski harga biji kering saat ini relatif tinggi, Rp 75.000/kg, tak juga kunjung memberikan keuntungan yang memotivasi petani sekitarnya untuk beralih kembali ke kakao.

Agroforestri kakao: implementasi ekonomi hijau di tingkat tapak

Abidin dan Leang hanya segelintir petani yang masih bertahan dan percaya bahwa kebun kakaonya masih memiliki harapan. Melalui riset aksi Land4Lives yang diimplementasikan oleh CIFOR-ICRAF Indonesia dengan dukungan Pemerintah Kanada, keduanya ikut berpartisipasi dalam seri pelatihan pertanian cerdas iklim melalui pendekatan sistem agroforestri. Kegiatan ini dilakukan di 12 desa dampingan Land4Lives di Kabupaten Bone, dan desa mereka termasuk di antaranya.

Kebun-kebun kakao yang sudah tua seperti milik Abidin kemudian diremajakan dengan metode sambung samping dan penyisipan tanaman dengan varietas unggul, serta perbaikan kondisi tanah dengan pupuk organik agar lebih

produktif. Selain itu, kebunnya juga ditanami alpukat, durian, dan matoa di sela tanaman kakao.

"Kakao saya yang dulunya sudah tua dan tidak produktif, sekarang sudah mulai berbuah", ujar Abidin.

Begitupun dengan Leang, setelah dilatih dan didampingi, kebun kakaonya kini telah diperkaya dengan multiklon varietas unggul kakao, memperbanyak bahan organik, serta menambah nilai jual biji kakaonya dengan metode fermentasi biji.

"Harga biji kakao bisa naik sampai 20-30% kalau difermentasi dulu", tegasnya.

Tak hanya manfaat ekonomi, agroforestri kakao dengan berbagai jenis tanaman di dalamnya juga memberikan manfaat lingkungan, sumber pangan, serta pendapatan tambahan. Apa yang dilakukan oleh Abidin dan Leang merupakan contoh kecil implementasi ekonomi hijau di tingkat tapak, yakni meningkatkan produktivitas dan perbaikan rantai nilai.

Sejalan dengan inisiatif dan komitmen di tingkat provinsi

Upaya Abidin dan Leang tidaklah cukup jika tidak didukung kebijakan yang tepat. Kakao,



Foto 1. Abidin dan Leang memperlihatkan hasil panen kakao mereka.

sebagai komoditas unggulan saat ini perlu dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Melalui dukungan ICRAF Indonesia dalam riset aksi Land4Lives, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah berupaya mewujudkannya melalui Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.

“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tinggi mestinya tidak lagi mengorbankan kualitas lingkungan dan keadilan sosial”, tegas Inyo, S.T., M.Eng., Kepala

Bidang Ekonomi dan SDA Bappelitbangda Sulawesi Selatan. Menurutnya, pengembangan agroforestri kakao adalah salah satu solusinya.

Melalui strategi pengembangan produktivitas dan perbaikan rantai nilai yang mendukung pengembangan ekonomi, langkah ini dilakukan dengan mengintegrasikan perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan,

yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD). Sebagai hasilnya, kebijakan dan program pemerintah tersebut akan dapat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Abidin dan Leang di tingkat tapak, untuk kemudian diimplementasi secara luas di Sulawesi Selatan.

Dikdik Permadi dan Ira Ratna Sari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Menanamkan rasa aman pada iklim yang menantang

Pertumbuhan ekonomi hijau untuk kebun dapur berkelanjutan



Foto 1. Kebun Dapur di TTS



Balgies Devi Fortuna
Research Officer –
Community Development
✉ b.fortuna@cifor-icraf.org

Di tengah meningkatnya kerawanan pangan dan dampak besar perubahan iklim, kebutuhan akan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Tantangan ini sangat terasa di wilayah kering seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menghadapi musim kemarau panjang, curah hujan tak terduga, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Agustus ini

misalnya, beberapa daerah di NTT justru diguyur hujan disertai angin kencang di tengah musim yang seharusnya kemarau.

Kondisi cuaca yang tak menentu ini memerlukan pendekatan pertanian adaptif, baik di skala besar maupun rumah tangga. Sayangnya, saat ini pemerintah masih lebih fokus pada pertanian skala besar. Sementara solusi di tingkat tapak, seperti pembangunan kebun dapur rumah tangga, sering kali diinisiasi oleh masyarakat sendiri.

Kebun dapur sebagai upaya ketahanan pangan

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), sejumlah rumah tangga sudah mulai menerapkan kebun dapur keluarga. Upaya ini akan mendukung ketahanan pangan dan menjadi wujud nyata konsep pertumbuhan ekonomi hijau (*Green Growth Program/ GGP*) yang dimulai dari lingkungan rumah tangga.

Meski kebun dapur dapat menjadi solusi atas ketahanan pangan dengan memenuhi kebutuhan pangan yang beragam dan aman, berbagai kendala dalam penerapannya masih banyak dikeluhkan, seperti penyediaan air bersih, bibit, pupuk organik, dan lainnya. Masalah ini menimbulkan keraguan, apakah langkah kecil di tingkat tapak ini cukup layak untuk diteruskan?

Strategi Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT	
Strategi 1	Tata guna lahan berkelanjutan
Strategi 2	Penguatan kelembagaan dan peningkatan akses terhadap 5 (lima) modal penghidupan yang sensitif terhadap GEDSI
Strategi 3	Optimalisasi produktivitas, diversifikasi, peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan daerah yang berketahanan iklim
Strategi 4	Penguatan supply chain dan konektivitas ekonomi wilayah yang berkeadilan
Strategi 5	Restorasi lahan, hutan, pesisir dan sumber daya air
Strategi 6	Pendanaan inovatif multipihak melalui mekanisme investasi dan insentif jasa lingkungan



Foto 2. Penggunaan Irigasi Tetes Sederhana

“Saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan bahan kimia untuk budidaya sayuran, yang bisa merusak tanah dan membuat ketergantungan. Bukan untuk dikonsumsi keluarga, yang penting saat panen bisa langsung dijual dan dapat uang”, ucap Jekson Liubana, pengelola kebun dapur dari Desa Oepliki.

Situasi ini membutuhkan perhatian di tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menerapkan kebun dapur secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi hijau

Pada saat yang sama, pemerintah NTT tengah membangun dokumen perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau atau GGP. GGP memuat 6 strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial dengan tetap memastikan tersedianya jasa lingkungan serta mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Salah satu indikator makro yang ingin dicapai adalah ketahanan pangan. Pada penerapannya, ketahanan pangan bisa diwujudkan dengan sinergi indikator GGP yang lainnya, seperti ketahanan air.

Di Kab. TTS, NTT, yang memiliki musim kering panjang misalnya, jika ditanami dengan komoditas sayur dan buah-buahan musiman, maka hasilnya tidak akan optimal bila tidak dibarengi dengan upaya ketahanan air yang berkelanjutan. Upaya ditingkat tapak selama ini telah coba dilakukan, diantaranya melalui penggunaan irigasi tetes sederhana yang cukup membantu.

Namun begitu, perlu ada dukungan dari pemerintah setempat akan kepastian tersedianya air bersih dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan berbasis DAS dan

Strategi 1:
Tata Guna Lahan Berkelanjutan

Strategi 3: Optimalisasi produktivitas, diversifikasi, peningkatan daya saing dan nilai tambah sektor unggulan daerah yang berketahanan iklim

- ▶ Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pertanian yang cerdas iklim dan agroforestri

Strategi 5: Restorasi lahan, hutan, pesisir dan sumber daya air

- ▶ Memastikan ketersediaan air Masyarakat
- ▶ Pemberdayaan dan akses terhadap benih lokal
- ▶ Pemberdayaan dan akses ke pupuk organik dan pestisida nabati

restorasi lahan, hutan, pesisir, dan sumber daya air — yang tertulis dalam strategi GGP NTT — akan membantu kegiatan di tingkat tapak dengan memastikan bahwa kebun dapur mendapatkan akses terhadap air secara berkelanjutan.

Tantangan keberlanjutan

Selain air, kendala lainnya yang dihadapi masyarakat TTS adalah penyediaan benih lokal berkualitas untuk penerapan kebun dapur. Hanya sebagian tanaman yang dapat dibiakkan sendiri, sementara benih hibrida di pasaran memiliki harga yang cukup tinggi dan sulit dibiakkan kembali.

Strategi 3 GGP NTT juga dapat memberikan kepastian untuk peningkatan kapasitas masyarakat rentan mengenai praktik pertanian yang baik, sehingga dapat mendukung akses terhadap benih yang lebih beragam dan meningkatkan produksi komoditas yang tahan iklim. Belum banyak masyarakat yang memahami konsep pertanian cerdas iklim yang lebih ramah lingkungan, tahan terhadap guncangan iklim, dan menghasilkan produksi pangan yang lebih aman.

Mama Mawarni Sinaga dari Desa Hoi menuturkan, perlu adanya aturan pemerintah untuk kegiatan

penanaman bersama secara organik, agar masyarakat dapat melakukan penanaman secara berkelanjutan dengan pupuk organik yang diproduksi sendiri.

“Harus ada pendampingan rutin dari pemerintah agar petani bisa diarahkan, atau dengan kemitraan antar petani sehingga terus berkelanjutan”, tambahnya.

Senada dengan Mama Sinaga, Izhar, fasilitator kebun dapur menyatakan bahwa penerapan GGP ditingkat tapak membutuhkan pendampingan

dan diskusi multipihak, terlebih dari pihak pemerintah ke komunitas lokal. “Salah satu bentuk dukungan yang diperlukan ke depan adalah pengembangan kebun belajar yang dapat dijadikan contoh untuk pengelolaan bentang lahan yang baik dan mengurangi dampak perubahan iklim. Semoga hadirnya pemerintah daerah di tingkat tapak untuk berdiskusi tentang GGP, dapat membuka jalan bagi petani dan lingkungan yang kita pijak”, ujarnya.

Pembangunan kebun dapur oleh masyarakat merupakan langkah awal yang baik untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Namun, perlu ada kepastian akan faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan masyarakat. Karenanya, dokumen GGP NTT dan komitmen pemerintah menjadi penting sebagai landasan dan jaminan tercapainya kemandirian pangan.

Izhar Ashofie, Alfonsus Seran, dan Fitri Marulani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pojok Anak

Upaya sederhana untuk libatkan perempuan dalam ekonomi hijau



Era Irhamni

Stakeholder Engagement Officer

e.irhamni@cifor-icraf.org

Pri fokus mengikuti pelatihan pertanian cerdas iklim di desa Mendis Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Putranya yang berusia 4 tahun asyik bermain dan menggambar di pojok anak yang disediakan oleh CIFOR-ICRAF Indonesia. Perempuan 40 tahun itu mengaku sudah lama sejak ia dapat mengikuti pertemuan di desa dengan tenang.

“Aku kalau ada pertemuan di desa jarang ikut, bawa bocah cilik ngerepotin, bentar-bentar minta pulang. Tapi di pelatihan ICRAF ini ada pojok anak jadi anakku bisa main dan menggambar, jadi aku pun agak tenang mengikuti kegiatan,” kata Pri.

Pojok anak selalu dihadirkan oleh CIFOR-ICRAF Indonesia dalam setiap kegiatan riset-aksi Land4Lives di desa, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Kanada. Anak-anak diberikan alat menggambar dan mewarnai, cemilan sehat, dan mainan supaya mereka ‘sibuk sendiri’, membiarkan para ibu berkegiatan dengan tenang. “Saya merasa terbantu,” kata Sri Bawon, ibu dua anak dari desa Jalur Mulya.

Ide untuk membuka pojok anak muncul ketika tim CIFOR-ICRAF di Sumatera Selatan mengadakan kegiatan bersama kelompok-kelompok wanita tani di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Saleh Sugihan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lalan Mendis. Keharusan mengasuh anak selama kegiatan berlangsung membuat banyak

ibu kewalahan, bahkan tidak sedikit peserta yang terpaksa pulang sebelum kegiatan usai karena anaknya merengek dan menangis. Pojok anak adalah inisiatif sederhana namun penting untuk mengatasi salah satu hambatan struktural yang dihadapi perempuan ketika hendak berperan serta dalam pertumbuhan ekonomi hijau. Kesetaraan dan keadilan gender menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian, mengingat perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi landasan bagi pentingnya kesetaraan peran dalam ekonomi hijau.

Peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi hijau tidak boleh diremehkan. Di Sumatera Selatan, salah satu provinsi penghasil karet, kopi, dan kelapa sawit terbesar di Indonesia,

perempuan banyak berperan dalam ranah produktif. Contohnya di desa Pelaju, perempuan terlibat dalam mengelola kebun karet seperti menderes, membersihkan gulma, dan memupuk. Di desa Ganesha Mukti, perempuan membantu menggarap sawah, menyemai bibit, membersihkan gulma, memupuk, dan melakukan penyemprotan. Di tengah semua kesibukan itu, perempuan juga masih menanggung banyak pekerjaan rumah tangga.

Pekerjaan seperti memasak makanan bagi keluarga, mengasuh, merawat dan mendidik anak, menjaga kesehatan anak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memastikan kecukupan kebutuhan keluarga cukup menyita waktu sehingga kerap

menghambat perempuan dalam melibatkan diri di kegiatan selain kegiatan domestik. Selain itu, anggapan di masyarakat bahwa pekerjaan perempuan di lahan pertanian sekadar membantu dan bukan pekerjaan utama, membuat perempuan jarang diajak untuk terlibat dalam kegiatan pelatihan maupun forum publik.

Pojok anak yang disediakan CIFOR-ICRAF dalam kegiatan Land4Lives telah membantu meningkatkan keterlibatan para wanita tani dalam berbagai aktivitas pengelolaan bentang lahan berkelanjutan. Namun, ini belumlah cukup. Masih perlu komitmen dan dukungan berbagai pihak dalam menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak dan perempuan secara berkesinambungan.

Dukungan bisa datang dari ayah/suami berupa kesediaan untuk berbagi peran dalam ranah domestik. Dukungan juga dapat berbentuk ruang khusus perempuan bagi yang menyusui dan ruang bermain anak pada setiap ruang publik. Dan yang terpenting, memberi perempuan kesempatan untuk menyuarakan pendapat atau aspirasi dalam forum publik serta meningkatkan kapasitas dirinya. Dengan demikian, kontribusi perempuan terutama para wanita tani dapat meningkat dan berdampak positif bagi pencapaian tujuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi hijau di Sumatera Selatan.

Sinta Damayanti, Andi Prahmono, dan Iskak Nungky Ismawan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Menjemput harapan berkembangnya Kopi dari Tanah Timor



**Nurhayatun
Nafsiyah**

*Economy and Knowledge
Management Research
Assistant*

n.nafsiyah@cifor-icraf.org

Nusa Tenggara Timur (NTT) tak hanya memukau dengan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki kekayaan kopi yang menjanjikan, yang tengah menanti untuk digali dan dikembangkan. Dalam beberapa tahun belakangan, gelombang kecintaan terhadap kopi terus meluas, baik di Tingkat domestik maupun global. Kafe-kafe menjamur, kopi spesialti (premium) mulai disukai dan tumbuh, ditambah para penikmat kopi tak lagi sekadar mencari kafein, melainkan juga cita rasa dan cerita dibaliknya. Di tengah gelombang ini,

NTT memiliki peluang untuk mengambil peran, menawarkan bukan hanya sekadar biji kopi, tetapi juga karakter khas daerah asalnya. Kopi NTT sangat terkenal dengan kopi spesialti arabikanya seperti di daerah Flores, Bajawa, Manggarai dan Lembata, memiliki karakter kuat dengan tingkat keasaman sedang dan rasa manis dengan kandungan aroma tembakau, kacang-kacangan seperti karamel, hazelnut, dan kacang macadamia.

Menurut International Coffee Organization (ICO), permintaan kopi global diproyeksikan akan terus tumbuh, didorong oleh peningkatan populasi dan perubahan gaya hidup yang menjadikan kopi sebagai kebutuhan harian. Indonesia sendiri, salah satu produsen

kopi terbesar di dunia, tak hanya menyuplai pasar internasional, namun juga menghadapi lonjakan konsumsi domestik. Situasi ini menjadikan kopi sebagai komoditas strategis yang tak hanya berperan dalam neraca ekspor, tetapi juga dalam pemberdayaan petani lokal.

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, produksi kopi di Indonesia mencapai 758 ribu ton, dengan 40.899 ton diantaranya telah diekspor. Nusa Tenggara Timur tampil sebagai salah satu daerah yang menyumbang capaian nasional tersebut. Dengan luas perkebunan 75.284 hektare, NTT menghasilkan 25.629 ton pada tahun yang sama, yang sebagian besar dikelola oleh petani kecil.



© Muhammad Azizy/CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Meski memiliki peluang cerah, budidaya kopi di NTT masih menghadapi berbagai tantangan. Di banyak wilayah, praktik budidaya kopi masih dilakukan secara tradisional, peremajaan belum banyak dilakukan, dan penerapan pola tanam belum optimal. Di sisi lain, dampak cuaca ekstrim serta perubahan iklim yang memengaruhi produksi kopi, menyebabkan tekanan bagi petani yang mungkin sangat bergantung pada komoditas ini.

Data tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total 75.284 hektare kebun kopi di NTT, hanya 64% yang tergolong lahan produktif. Sekitar 24% di antaranya masih belum berproduksi, sementara 12% sisanya telah masuk kategori tidak produktif. Data ini memperlihatkan bahwa hampir setengah dari total lahan kopi berada dalam kondisi belum dan tidak produktif. Dalam upaya mendorong produksi kopi NTT, peremajaan lahan tidak produktif dapat menjadi salah satu prioritas, disertai penerapan pola tanam dan praktik budidaya yang baik.

Berbagai langkah strategis dapat dilakukan melalui peremajaan, seperti menggunakan bibit unggul, membuat bibit unggul melalui sambung pucuk, atau meremajakan tanaman tua dengan teknik sambung samping. Namun, proses peremajaan sering kali menjadi kendala besar, terutama petani yang tidak memiliki simpanan uang yang cukup. Kurangnya perencanaan kebun dan manajemen keuangan membuat petani kesulitan saat produktivitas kopi menurun, karena tidak ada dana untuk peremajaan. Akibatnya, ketika tanaman kopi mulai tua dan menurun produktivitasnya, petani tidak memiliki simpanan dana untuk melakukan peremajaan, sehingga lahan dibiarkan tidak produktif dalam waktu yang lama. Solusinya adalah membuat

bibit unggul mandiri atau melalui kelompok, sehingga dapat menekan biaya peremajaan.

Minimnya peremajaan serta praktik budidaya yang kurang optimal bukan sekedar persoalan teknis yang dihadapi petani kopi di NTT. Sebagai contoh budidaya kopi di Manggarai Timur, budidaya dengan pola kebun campur kopi- cengkeh yang pemupukannya belum konsisten, karena masih hanya difokuskan pada cengkeh saja dan bergantung pada ketersediaan pupuk yang dimiliki petani. Akibatnya produktivitas kopi hanya berada di kisaran 1,4 ton/ha/tahun, kondisi ini jauh dari potensi optimal. Jika pola ini terus berlanjut, maka tidak hanya pendapatan petani yang tak kunjung membaik, tapi posisi kopi idola dari timur akan tergerus dan mengurangi peluang perpuatan ekonomi.

Lahan yang tidak lagi menghasilkan perlu diremajakan, sementara lahan yang belum berproduksi perlu ditingkatkan produktivitasnya melalui penerapan budidaya dengan sistem *good agriculture practices* (GAP). Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain penggunaan benih unggul, pemupukan intensif, pembangunan rorak, dan pengolahan paskapanen. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Budidaya

kopi dengan GAP mampu meningkatkan produksi rata-rata 1,6 juta ton/ha/tahun, membutuhkan 100 hari orang kerja per tahun, dan mampu menghasilkan keuntungan Rp128.000.000/ha selama 30 tahun, dengan rata-rata pendapatan petani Rp10.000.000/ha/tahun.

Selain dari aspek budidaya, peningkatan rantai nilai dan hilirisasi produk kopi seperti biji kopi sangrai dan bubuk kopi premium menjadi langkah penting di tingkat lokal. Produk-produk ini bisa menyasar kepada sektor industri makanan dan minuman seperti kafe, atau bahkan jika ketika nantinya ditujukan untuk ekspor, kopi tidak hanya berupa biji mentah, tetapi memiliki nilai tambah yang lebih baik.

Upaya peremajaan, pengoptimalan praktik pertanian yang baik guna meningkatkan produktivitas dan produksi jangka panjang sekaligus mendorong hilirisasi kopi adalah bentuk nyata dalam mendukung strategi pertumbuhan ekonomi hijau di NTT. Dengan demikian, setiap cangkir kopi yang dinikmati tidak hanya menghadirkan kenikmatan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

*Thifali Adzani dan Ade Oktariansyah
berkontribusi dalam penulisan
artikel ini.*

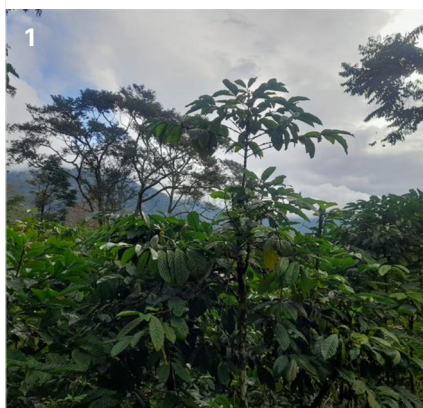


Foto 1. Kebun kopi



Pojok Publikasi

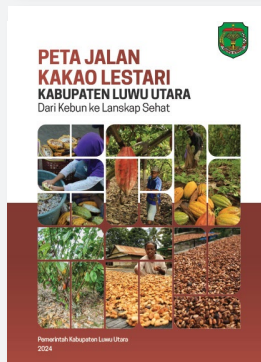


Rencana Induk (*Masterplan*) Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Terpadu

Arga Pandiwiya, Tania Benita, Feri Johana, Dhian Rachmawati,
Andree Ekadinata, Sonya Dewi

Lembar publikasi ini memperkenalkan tentang Rencana Induk (*Masterplan*) pengelolaan bentang darat dan laut (*Land and Seascape/LaS*). Masterplan bertujuan mencapai target pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip ekonomi hijau dan biru, perlindungan dan restorasi ekosistem, penanganan pencemaran, promosi praktik bisnis berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi rantai pasok, multipihak, dan multi sektor.

cifor-icraf.org/knowledge/publication/44617/



Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara

Tim Kelompok Kerja Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menghadapi penurunan produksi kakao akibat alih fungsi lahan, tanaman kakao usia tua, hama, penyakit, dan dampak iklim. Untuk mengatasi tantangan ini, disusun sebuah dokumen "Peta Jalan Kakao Lestari" sebagai panduan strategis menuju pembangunan kakao berkelanjutan yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan.

darikebunkelanskapsehat.id/kegiatan/publikasi/?pid=5268



Taklimat Edisi Pertumbuhan Ekonomi Hijau #01 Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan

Tim POKJA Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan,
CIFOR-ICRAF Indonesia

Di hadapan tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, Sulawesi Selatan mengambil pendekatan baru dalam pembangunan: ekonomi hijau. Taklimat (Berita Iklim Singkat) ini menjabarkan modal awal, tantangan, hingga rekomendasi strategi untuk pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan. Ditunjukkan pula perbandingan skenario Business as Usual (BAU) dengan *Green Growth Plan* (GGP) dalam hal tutupan lahan, emisi Gas Rumah Kaca, erosi dan degradasi lahan, pertumbuhan PDRB, serapan tenaga kerja, pendapatan daerah, hingga intensitas emisi.

agroforestri.id/Taklimat01-GGPSulsel



Taklimat Edisi Pertumbuhan Ekonomi Hijau #02 Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nusa Tenggara Timur

Tim POKJA Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Nusa Tenggara Timur,
CIFOR-ICRAF Indonesia

Taklimat ini menjabarkan *Green Growth Plan* (GGP) untuk skenario NTT, yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT bersama CIFOR-ICRAF Indonesia/Land4Lives sebagai panduan strategis pembangunan berkelanjutan hingga 2050. GGP NTT merespons tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan di provinsi dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

agroforestri.id/Taklimat02-GGPNTT



CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) memanfaatkan sumber daya pepohonan, hutan, dan bentang alam agroforestri untuk menghadapi tantangan terberat dunia saat ini – berkurangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesejahteraan, dan ketidaksetaraan.

Koleksi publikasi dapat diakses melalui:
www.cifor-icraf.org/knowledge/publications

Informasi lebih lanjut:

icraf-indonesiamedia@cifor-icraf.org

www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia